



SALINAN

BUPATI LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

PERGESERAN KEDUA PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 124/BKAD/2024 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat kepada Pemerintah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2024;
 - c. bahwa berdasarkan Surat Edaran Bupati Landak Nomor 900.1.1/421/II-BPKAD tentang Pergeseran Kedua APBD Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2024;
 - d. bahwa berdasarkan Surat Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Nomor KP.AKT-AKT/SRT.B-38/2024 tentang Tindak Lanjut Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2023;
 - e. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Landak Nomor 900.1.14.2/413/III-BPKAD tentang Penyertaan Modal;
 - f. bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor

100.3.3.1/259/BKAD tentang Informasi Pemberian Bankeu Khusus TA 2024;

- g. bahwa berdasarkan Surat Direktur Utama PT.Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Nomor KP.TSI-PD/SRT.R-273/2024 tentang Penyampaian Informasi Penyertaan Modal;
- h. bahwa berdasarkan Surat Bupati Landak Nomor 900.1/571/II-BPKAD tentang Lanjutan Pergeseran Kedua APBD Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2024;
- i. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pergeseran Kedua Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2024;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
- 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
27. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
28. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2023 tentang Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6884);
29. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 364) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 11);
30. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
31. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

32. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
33. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 218) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 24);
34. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 151);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
37. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 128/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Rokok Sebagai Kontribusi Dukungan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1348);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 616);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
41. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1148) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 976);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
44. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1402) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 14/PMK.07/2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 193);
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemberian dan Penghentian Pembayaran Penghasilan Pejabat Administrasi yang Terdampak Penataan Birokrasi Bagi Pegawai Negeri Sipil di Instansi Daerah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 756);
46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
47. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis

Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1121);

48. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2023 tentang Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Pada Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 510);
49. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 715);
50. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2023 tentang Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kategori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pada Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 758);
51. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 807);
52. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal Tahun 2024 Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 932);
53. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
54. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 350 Tahun 2023 tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan Kategori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pada Tahun Anggaran 2023 Menurut Provinsi/ Kabupaten/ Kota;
55. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 400 Tahun 2023 tentang Keputusan Menteri Keuangan tentang Alokasi Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan Untuk Kelompok Kategori Kinerja Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah Pada Tahun Anggaran 2023 Periode Ketiga Menurut Provinsi/ Kabupaten/ Kota;
56. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 98);

57. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Landak Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 62);
58. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Landak Tahun 2017–2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 70) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Landak Tahun 2017–2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 90);
59. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2019 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 86);
60. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 97);
61. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 107);
62. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2023 Nomor 6);
63. Peraturan Bupati Landak Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2021 Nomor 728);

64. Peraturan Bupati Landak Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2021 Nomor 734);
65. Peraturan Bupati Landak Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2022 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Landak Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Landak Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2022 Nomor 41);
66. Peraturan Bupati Landak Nomor 23 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Kabupaten Landak Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2023 Nomor 23);
67. Peraturan Bupati Landak Nomor 57 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Hibah Pendanaan Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Landak Tahun 2024 yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2023 Nomor 57);
68. Peraturan Bupati Landak Nomor 65 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2023 Nomor 65).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERGESERAN KEDUA PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Pergeseran Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 terdiri atas:

- | | | | |
|---|--|-------------------------|-------------------------|
| 1. Pendapatan Daerah | | | |
| a. Semula | | Rp 1.403.883.855.129,00 | |
| b. Bertambah / (berkurang) | | Rp 11.863.250.367,00 | |
| Jumlah Pendapatan Daerah setelah pergeseran | | | Rp 1.415.747.105.496,00 |

2. Belanja Daerah			
a. Semula	Rp	1.437.116.577.846,00	
b. Bertambah / (berkurang)	Rp	16.030.527.650,00	
Jumlah Belanja Daerah setelah pergeseran			Rp 1.453.147.105.496,00
Surplus/Defisit setelah pergeseran			(Rp 37.400.000.000,00)
3. Pembiayaan Daerah			
a. Penerimaan Pembiayaan			
1) Semula	Rp	40.000.000.000,00	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah pergeseran			Rp 40.000.000.000,00
b. Pengeluaran Pembiayaan			
1) Semula	Rp	6.767.277.283,00	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	(4.167.277.283,00)	
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah pergeseran			Rp 2.600.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Neto setelah pergeseran			Rp 37.400.000.000,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN			Rp 0,00

Pasal 2

Pergeseran Kedua Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 29 April 2024

Pj. BUPATI LANDAK,

TTD

SAMUEL

Diundangkan di Ngabang
pada tanggal 29 April 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LANDAK,

TTD

VINSENSIUS

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2024 NOMOR 6





KABUPATEN LANDAK
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,
OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

KODE	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100.684.475.660,00	101.547.726.027,00	863.250.367,00
4.1.01	Pajak Daerah	54.170.000.000,00	54.170.000.000,00	0,00
4.1.01.06	Pajak Hotel	180.000.000,00	0,00	-180.000.000,00
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	150.000.000,00	0,00	-150.000.000,00
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	150.000.000,00	0,00	-150.000.000,00
4.1.01.06.03	Pajak Lesman	30.000.000,00	0,00	-30.000.000,00
4.1.01.06.03.0001	Pajak Lesman	30.000.000,00	0,00	-30.000.000,00
4.1.01.07	Pajak Restoran	2.620.000.000,00	0,00	-2.620.000.000,00
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	65.000.000,00	0,00	-65.000.000,00
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	65.000.000,00	0,00	-65.000.000,00
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	230.000.000,00	0,00	-230.000.000,00
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	230.000.000,00	0,00	-230.000.000,00
4.1.01.07.03	Pajak Kafe/Bar dan Sejenisnya	40.000.000,00	0,00	-40.000.000,00
4.1.01.07.03.0001	Pajak Kafe/Bar dan Sejenisnya	40.000.000,00	0,00	-40.000.000,00
4.1.01.07.05	Pajak Warung dan Sejenisnya	130.000.000,00	0,00	-130.000.000,00
4.1.01.07.05.0001	Pajak Warung dan Sejenisnya	130.000.000,00	0,00	-130.000.000,00
4.1.01.07.07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	2.155.000.000,00	0,00	-2.155.000.000,00
4.1.01.07.07.0001	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	2.155.000.000,00	0,00	-2.155.000.000,00
4.1.01.08	Pajak Hiburan	32.000.000,00	0,00	-32.000.000,00
4.1.01.08.07	Pajak Permainan Billar dan Bowling	3.240.000,00	0,00	-3.240.000,00
4.1.01.08.07.0001	Pajak Permainan Billar dan Bowling	3.240.000,00	0,00	-3.240.000,00
4.1.01.08.08	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Kelangkasari	23.800.000,00	0,00	-23.800.000,00
4.1.01.08.08.0001	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Kelangkasari	23.800.000,00	0,00	-23.800.000,00
4.1.01.08.09	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	5.160.000,00	0,00	-5.160.000,00
4.1.01.08.09.0001	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	5.160.000,00	0,00	-5.160.000,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Mergalinn	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Mergalinn	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
4.1.01.10	Pajak Penertangan Jalan	8.300.000.000,00	0,00	-8.300.000.000,00
4.1.01.10.02	Pajak Penertangan Jalan Sumber Lain	8.300.000.000,00	0,00	-8.300.000.000,00
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penertangan Jalan Sumber Lain	8.300.000.000,00	0,00	-8.300.000.000,00
4.1.01.11	Pajak Parkir	13.000.000,00	0,00	-13.000.000,00
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	13.000.000,00	0,00	-13.000.000,00
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	13.000.000,00	0,00	-13.000.000,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.100.000.000,00	2.100.000.000,00	0,00
4.1.01.14.23	Pajak Pasir dan Kerikil	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00
4.1.01.14.23.0001	Pajak Pasir dan Kerikil	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00
4.1.01.14.28	Pajak Tanah Serap (Fullers Earth)	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00
4.1.01.14.28.0001	Pajak Tanah Serap (Fullers Earth)	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00
4.1.01.14.37	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya	1.750.000.000,00	1.750.000.000,00	0,00
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	1.750.000.000,00	1.750.000.000,00	0,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	3.600.000.000,00	3.600.000.000,00	0,00
4.1.01.15.01	PBBP2	3.600.000.000,00	3.600.000.000,00	0,00
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	3.600.000.000,00	3.600.000.000,00	0,00
4.1.01.16	Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	370.000.000.000,00	370.000.000.000,00	0,00
4.1.01.16.01	BPHTB Perindahan Hak	3.200.000.000,00	3.200.000.000,00	0,00
4.1.01.16.01.0001	BPHTB Pemindahan Hak	3.200.000.000,00	3.200.000.000,00	0,00
4.1.01.16.02	BPHTB-Pemberian Hak Baru	33.800.000.000,00	33.800.000.000,00	0,00
4.1.01.16.02.0001	BPHTB Pemberian Hak Baru	33.800.000.000,00	33.800.000.000,00	0,00
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	0,00	11.145.000.000,00	11.145.000.000,00
4.1.01.19.01	PBJT Makanan dan/atau Minuman	0,00	2.620.000.000,00	2.620.000.000,00
4.1.01.19.01.0001	PBJT-Restoran	0,00	465.000.000,00	465.000.000,00
4.1.01.19.01.0002	PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering	0,00	2.155.000.000,00	2.155.000.000,00
4.1.01.19.02	PBJT Tenaga Listrik	0,00	8.300.000.000,00	8.300.000.000,00
4.1.01.19.02.0001	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	0,00	8.300.000.000,00	8.300.000.000,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4.1.01.19.03	PBJT-Jasa Perhotelan	0,00	180.000.000,00	180.000.000,00
4.1.01.19.03.0001	PBJT-Hotel	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00
4.1.01.19.03.0006	PBJT-Lystron	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00
4.1.01.19.04	PBJT-Jasa Parkir	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00
4.1.01.19.04.0001	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00
4.1.01.19.05	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	0,00	32.000.000,00	32.000.000,00
4.1.01.19.05.0006	PBJT-Pernikahan Ketangkasan	0,00	23.600.000,00	23.600.000,00
4.1.01.19.05.0009	PBJT-Olahraga Perumahan dengan Meningkatkan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Olahragawan	0,00	8.400.000,00	8.400.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	3.460.440.000,00	3.460.440.000,00	0,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	2.879.360.000,00	2.879.360.000,00	0,00
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	575.000.000,00	0,00	-575.000.000,00
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	575.000.000,00	0,00	-575.000.000,00
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.156.320.000,00	1.156.320.000,00	0,00
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.156.320.000,00	1.156.320.000,00	0,00
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	548.040.000,00	548.040.000,00	0,00
4.1.02.01.05.0001	Retribusi Pelajaran	71.040.000,00	71.040.000,00	0,00
4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	140.760.000,00	140.760.000,00	0,00
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kos	336.240.000,00	336.240.000,00	0,00
4.1.02.01.14	Retribusi Pelayanan Kebersihan	0,00	575.000.000,00	575.000.000,00
4.1.02.01.14.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan	0,00	575.000.000,00	575.000.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	323.080.000,00	323.080.000,00	0,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemekalan Kekayaan Daerah	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemekalan Ruangan	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	43.680.000,00	43.680.000,00	0,00
4.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	43.680.000,00	43.680.000,00	0,00
4.1.02.02.06	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
4.1.02.02.06.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
4.1.02.02.08	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00
4.1.02.02.08.0001	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4.1.02.02.09.0001	Rampasan Pelayaran Tempat Rekreasi dan Olahraga	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
4.1.02.02.11	Rampasan Penjualan Produksi Usaha Daerah	95.000.000,00	0,00	-95.000.000,00
4.1.02.02.11.0101	Rampasan Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	15.000.000,00	0,00	-15.000.000,00
4.1.02.02.11.0002	Rampasan Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit Ternak	15.000.000,00	0,00	-15.000.000,00
4.1.02.02.11.0003	Rampasan Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	65.000.000,00	0,00	-65.000.000,00
4.1.02.02.19	Rampasan Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintahan Daerah	0,00	95.000.000,00	95.000.000,00
4.1.02.02.19.0001	Rampasan Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintahan Daerah	0,00	95.000.000,00	95.000.000,00
4.1.02.03	Rampasan Peminjaman Tertentu	258.000.000,00	258.000.000,00	0,00
4.1.02.03.07	Rampasan Persetujuan Bangunan Gedung	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
4.1.02.03.07.0001	Rampasan Persetujuan Bangunan Gedung	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
4.1.02.03.08	Rampasan Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	108.000.000,00	108.000.000,00	0,00
4.1.02.03.08.0001	Rampasan Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	108.000.000,00	108.000.000,00	0,00
4.1.03	Kas Pengkulturan Kekayaan Daerah yang Dipertahankan	6.167.277.283,00	7.030.527.650,00	863.250.367,00
4.1.03.02	Bugian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	6.167.277.283,00	7.030.527.650,00	863.250.367,00
4.1.03.02.01	Bugian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lainbagi Keuangan)	6.167.277.283,00	7.030.527.650,00	863.250.367,00
4.1.03.02.01.0001	Bugian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lainbagi Keuangan)	6.167.277.283,00	7.030.527.650,00	863.250.367,00
4.1.04	Lebaran PAD yang Sah	36.886.758.377,00	36.886.758.377,00	0,00
4.1.04.05	Jasa Giro	4.786.758.377,00	4.786.758.377,00	0,00
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	4.786.758.377,00	4.786.758.377,00	0,00
4.1.04.05.04.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	4.786.758.377,00	4.786.758.377,00	0,00
4.1.04.07	Pembiayaan Bunga	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00
4.1.04.07.01	Pembiayaan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintahan Daerah	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00
4.1.04.07.01.0001	Pembiayaan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintahan Daerah	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00
4.1.04.11	Pembayaran Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00
4.1.04.11.01	Pembayaran Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00
4.1.04.11.01.0001	Pembayaran Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00
4.1.04.12	Pembiayaan Denda Pajak Daerah	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4.1.04.12.15	Pembiayaan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Pembebasan dan Pengkangan (PBBP2)	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
4.1.04.12.15.0001	Pembiayaan Denda PBBP2	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
4.1.04.15	Pembiayaan dari Pengembalian	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
4.1.04.15.08	Pembiayaan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
4.1.04.15.08.0001	Pembiayaan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PUS	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
4.1.04.16	Pembiayaan BLUD	27.000.000.000,00	27.000.000.000,00	0,00
4.1.04.16.02	Pembiayaan BLUD dari Jasa Layanan	27.000.000.000,00	27.000.000.000,00	0,00
4.1.04.16.02.0001	Pembiayaan BLUD dari Jasa Layanan	27.000.000.000,00	27.000.000.000,00	0,00
4.1.04.17	Pembiayaan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dibisankan	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
4.1.04.17.02	Pembiayaan Denda Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
4.1.04.17.02.0001	Pembiayaan Denda Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.274.099.379.469,00	1.285.099.379.469,00	11.000.000.000,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.233.073.354.000,00	1.233.073.354.000,00	0,00
4.2.01.01	Dana Pembiayaan	1.072.890.498.000,00	1.072.890.498.000,00	0,00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	44.651.170.000,00	44.651.170.000,00	0,00
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	13.747.189.000,00	13.747.189.000,00	0,00
4.2.01.01.01.0002	DBH Pajak Pasal 21	4.633.605.000,00	4.633.605.000,00	0,00
4.2.01.01.01.0004	DBH Nikotil Hasil Tembakau (CHT)	22.287.000,00	22.287.000,00	0,00
4.2.01.01.01.0009	Uang Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalti	10.862.952.000,00	10.862.952.000,00	0,00
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Dana Alokasi Khusus (DAK) PSDH	310.965.000,00	310.965.000,00	0,00
4.2.01.01.01.0012	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Dana Alokasi Khusus (DAK)	13.953.674.000,00	13.953.674.000,00	0,00
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.120.498.000,00	1.120.498.000,00	0,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	725.109.853.000,00	725.109.853.000,00	0,00
4.2.01.01.02.0001	DAU	556.588.624.000,00	556.588.624.000,00	0,00
4.2.01.01.02.0004	Dana Tambahan Dukungan Pembiayaan atas Pekerjaan Perijinan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	34.383.942.000,00	34.383.942.000,00	0,00
4.2.01.01.02.0005	DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan	93.492.353.000,00	93.492.353.000,00	0,00
4.2.01.01.02.0006	DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Kesehatan	14.917.130.000,00	14.917.130.000,00	0,00
4.2.01.01.02.0007	DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	25.727.804.000,00	25.727.804.000,00	0,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fink	117.337.488.000,00	117.337.488.000,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	260.907.000,00	260.907.000,00	0,00
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	8.012.250.000,00	8.012.250.000,00	0,00
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Guang Pendidikan-Reguler-SMP	6.031.232.000,00	6.031.232.000,00	0,00
4.2.01.01.03.0016	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pemurnan AKI dan AKS	201.128.000,00	201.128.000,00	0,00
4.2.01.01.03.0031	DAK Fisik-Bidang Puluman-Pemugasan/Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	20.920.000.000,00	20.920.000.000,00	0,00
4.2.01.01.03.0032	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Pemugasan	1.390.000.000,00	1.390.000.000,00	0,00
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	25.896.800.000,00	25.896.800.000,00	0,00
4.2.01.01.03.0035	DAK Fisik-Bidang Jalan-Pemugasan-Jalan	7.164.783.000,00	7.164.783.000,00	0,00
4.2.01.01.03.0039	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Pemugasan	14.534.438.000,00	14.534.438.000,00	0,00
4.2.01.01.03.0042	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Pemugasan	9.878.830.000,00	9.878.830.000,00	0,00
4.2.01.01.03.0043	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Pemugasan	5.441.409.000,00	5.441.409.000,00	0,00
4.2.01.01.03.0055	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Pemugasan-Keluarga Berencana	2.191.945.000,00	2.191.945.000,00	0,00
4.2.01.01.03.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	15.412.766.000,00	15.412.766.000,00	0,00
4.2.01.01.04	DAK Non Fisik Khusus Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	185.791.987.000,00	185.791.987.000,00	0,00
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TRG PNSD	47.566.506.000,00	47.566.506.000,00	0,00
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamzil Guru PNSD	1.681.623.000,00	1.681.623.000,00	0,00
4.2.01.01.04.0006	DAK Non Fisik-ITK PNSD	22.552.768.000,00	22.552.768.000,00	0,00
4.2.01.01.04.0016	DAK Non Fisik-BOKKI3-BOKB	5.435.374.000,00	5.435.374.000,00	0,00
4.2.01.01.04.0023	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pangan	3.324.975.000,00	3.324.975.000,00	0,00
4.2.01.01.04.0025	DAK Non Fisik-PR2UMK	404.106.000,00	404.106.000,00	0,00
4.2.01.01.04.0026	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	72.955.880.000,00	72.955.880.000,00	0,00
4.2.01.01.04.0027	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja	2.165.000.000,00	2.165.000.000,00	0,00
4.2.01.01.04.0028	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	4.576.770.000,00	4.576.770.000,00	0,00
4.2.01.01.04.0029	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
4.2.01.01.04.0030	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	473.200.000,00	473.200.000,00	0,00
4.2.01.01.04.0033	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kufusindukota	5.387.447.000,00	5.387.447.000,00	0,00
4.2.01.01.04.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	19.238.338.000,00	19.238.338.000,00	0,00
4.2.01.05	Dana Desa	151.802.945.000,00	151.802.945.000,00	0,00
4.2.01.05.01	Dana Desa	151.802.945.000,00	151.802.945.000,00	0,00
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	151.802.945.000,00	151.802.945.000,00	0,00
4.2.01.06	Jumlah Fisik	8.379.911.000,00	8.379.911.000,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4.2.01.06.01	Jumlah Pajak	8.379.911.000,00	8.379.911.000,00	0,00
4.2.01.06.01.0001	Pembiayaan Pajak	8.379.911.000,00	8.379.911.000,00	0,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	41.026.025.469,00	52.026.025.469,00	11.000.000.000,00
4.2.02.01	Pembiayaan Bagi Hasil	41.026.025.469,00	41.026.025.469,00	0,00
4.2.02.01.01	Pembiayaan Bagi Hasil Pajak	41.026.025.469,00	41.026.025.469,00	0,00
4.2.02.01.01.0001	Pembiayaan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	11.098.274.532,00	11.098.274.532,00	0,00
4.2.02.01.01.0002	Pembiayaan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	17.453.397.444,00	17.453.397.444,00	0,00
4.2.02.01.01.0003	Pembiayaan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	8.784.628.201,00	8.784.628.201,00	0,00
4.2.02.01.01.0004	Pembiayaan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	612.761.903,00	612.761.903,00	0,00
4.2.02.01.01.0005	Pembiayaan Bagi Hasil Pajak Rokok	3.076.963.389,00	3.076.963.389,00	0,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	0,00	11.000.000.000,00	11.000.000.000,00
4.2.02.02.02	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Pusat	0,00	11.000.000.000,00	11.000.000.000,00
4.2.02.02.02.0001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Pusat Provinsi	0,00	11.000.000.000,00	11.000.000.000,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	29.100.000.000,00	29.100.000.000,00	0,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00
4.3.01.01.01	Pembiayaan Hibah dari Pemerintah Pusat	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00
4.3.01.01.01.0001	Pendanaan Hibah dari Pemerintah Pusat	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00
4.3.03	Jumlah Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	28.500.000.000,00	28.500.000.000,00	0,00
4.3.03.02	Pembiayaan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	28.500.000.000,00	28.500.000.000,00	0,00
4.3.03.02.01	Pembiayaan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	28.500.000.000,00	28.500.000.000,00	0,00
4.3.03.02.01.0001	Pembiayaan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	28.500.000.000,00	28.500.000.000,00	0,00
	Jumlah Pendapatan	14.033.883.855.129,00	1.415.747.105.496,00	11.663.250.367,00
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI	1.011.482.816.626,00	1.025.882.416.865,00	14.399.600.239,00
5.1.01	Gaji Pegawai	576.678.689.104,00	569.567.450.143,00	-7.111.238.961,00
5.1.01.01	Balok Gaji dan Tunjangan ASN	365.440.432.817,00	358.293.733.856,00	-7.146.698.961,00
5.1.01.01.01	Balok Gaji Pokok ASN	282.121.053.709,00	284.195.724.856,00	17.935.329.053,00
5.1.01.01.01.0001	Balok Gaji Pokok PNS	211.475.073.358,00	211.475.073.358,00	0,00
5.1.01.01.01.0002	Balok Gaji Pokok PPPK	70.645.977.351,00	52.719.648.298,00	-17.935.329.053,00
5.1.01.01.02	Balok Tunjangan Keluarga ASN	21.021.657.251,00	24.962.837.240,00	3.541.179.989,00
5.1.01.01.02.0001	Balok Tunjangan Keluarga PNS	18.888.194.600,00	18.888.194.600,00	0,00
5.1.01.01.02.0002	Balok Tunjangan Keluarga PPPK	2.533.462.651,00	6.074.642.640,00	3.541.179.989,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.01.01.03	Billinga Tunjangan Jabatan ASN	5.264.363.650,00	5.264.363.650,00	0,00
5.1.01.01.03.0001	Billinga Tunjangan Jabatan PNS	5.264.363.650,00	5.264.363.650,00	0,00
5.1.01.01.04	Billinga Tunjangan Fungsional ASN	15.811.983.630,00	17.510.813.630,00	1.698.830.000,00
5.1.01.01.04.0001	Billinga Tunjangan Fungsional PNS	15.811.983.630,00	17.510.813.630,00	1.698.830.000,00
5.1.01.01.05	Billinga Tunjangan Fungsional Umum ASN	5.605.499.493,00	7.134.289.118,00	1.528.792.625,00
5.1.01.01.05.0001	Billinga Tunjangan Fungsional Umum PNS	3.884.923.093,00	3.884.923.093,00	0,00
5.1.01.01.05.0002	Billinga Tunjangan Fungsional Umum PPPK	1.720.576.400,00	3.249.366.025,00	1.528.792.625,00
5.1.01.01.06	Billinga Tunjangan Beras ASN	13.968.925.888,00	16.385.575.046,00	2.416.649.158,00
5.1.01.01.06.0001	Billinga Tunjangan Beras PNS	12.069.954.995,00	12.069.954.995,00	0,00
5.1.01.01.06.0002	Billinga Tunjangan Beras PPPK	1.898.970.893,00	4.315.620.051,00	2.416.649.158,00
5.1.01.01.07	Billinga Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	750.637.597,00	750.637.597,00	0,00
5.1.01.01.07.0001	Billinga Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	750.637.597,00	750.637.597,00	0,00
5.1.01.01.08	Billinga Pembulatan Gaji ASN	3.575.557,00	4.287.225,00	711.668,00
5.1.01.01.08.0001	Billinga Pembulatan Gaji PNS	3.126.693,00	3.126.693,00	0,00
5.1.01.01.08.0002	Billinga Pembulatan Gaji PPPK	448.864,00	1.160.532,00	711.668,00
5.1.01.01.09	Billinga Iuran Jaminan Kesehatan ASN	18.201.463.241,00	19.416.655.499,00	1.215.192.258,00
5.1.01.01.09.0001	Billinga Iuran Jaminan Kesehatan PNS	16.464.533.943,00	16.464.533.943,00	0,00
5.1.01.01.09.0002	Billinga Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	1.736.929.298,00	2.952.121.556,00	1.215.192.258,00
5.1.01.01.10	Billinga Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	572.819.423,00	633.559.360,00	60.739.937,00
5.1.01.01.10.0001	Billinga Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	507.016.429,00	507.016.429,00	0,00
5.1.01.01.10.0002	Billinga Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	65.802.994,00	126.542.931,00	60.739.937,00
5.1.01.01.11	Billinga Iuran Jaminan Kematian ASN	1.718.455.378,00	1.900.739.154,00	182.283.776,00
5.1.01.01.11.0001	Billinga Iuran Jaminan Kematian PNS	1.521.054.788,00	1.521.054.788,00	0,00
5.1.01.01.11.0002	Billinga Iuran Jaminan Kematian PPPK	197.400.590,00	379.684.366,00	182.283.776,00
5.1.01.01.12	Billinga Iuran Simpanan Peserta Tabungan Pensiunan Rakyat ASN	0,00	144.251.681,00	144.251.681,00
5.1.01.01.12.0002	Billinga Iuran Simpanan Peserta Tabungan Pensiunan Rakyat PPPK	0,00	144.251.681,00	144.251.681,00
5.1.01.02	Billinga Tambahan Penghasilan ASN	98.195.671.287,00	98.195.671.287,00	0,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	91.320.318.643,00	57.945.986.199,00	-33.373.332.644,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	61.040.581.319,00	50.968.730.973,00	-30.070.860.346,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	10.279.727.324,00	6.977.255.226,00	-3.302.472.298,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	4.772.923.031,00	38.146.255.675,00	33.373.332.644,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	3.759.723.515,00	38.842.195.900,00	30.082.472.385,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.101.02.030002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Mutu PPPK	1.013.199.516,00	4.304.059.775,00	3.290.860.259,00
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Mutu ASN	2.102.429.413,00	2.102.429.413,00	0,00
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Mutu PNS	1.642.616.725,00	1.642.616.725,00	0,00
5.1.01.02.04.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Mutu PPPK	459.812.688,00	459.812.688,00	0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Penimbangan Objek Lainya ASN	91.350.979.000,00	91.36.6.439.000,00	35.460.000,00
5.1.01.03.01	Bunga Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	2.708.500.000,00	2.708.500.000,00	0,00
5.1.01.03.01.0006	Bunga Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi	0,00	0,00	-9.000.000,00
5.1.01.03.01.0007	Bunga Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	131.000.000,00	0,00	-131.000.000,00
5.1.01.03.01.0008	Bunga Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	1.600.000,00	0,00	-1.600.000,00
5.1.01.03.01.0009	Bunga Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Negeri	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00
5.1.01.03.01.0010	Bunga Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penambangan Jalan	415.000.000,00	0,00	-415.000.000,00
5.1.01.03.01.0011	Bunga Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	6.500.000,00	0,00	-650.000,00
5.1.01.03.01.0012	Bunga Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
5.1.01.03.01.0013	Bunga Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Jalan Bujur Wajar	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00
5.1.01.03.01.0014	Bunga Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00
5.1.01.03.01.0015	Bunga Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00
5.1.01.03.01.0016	Bunga Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	1.850.000.000,00	1.850.000.000,00	0,00
5.1.01.03.01.0019	Bunga Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bangunan Jasa Tertentu (PBJT)	0,00	557.250.000,00	557.250.000,00
5.1.01.03.02	Bunga bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	173.022.000,00	173.022.000,00	0,00
5.1.01.03.02.0001	Bunga Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
5.1.01.03.02.0002	Bunga Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan dan Penyelenggaraan Kebersihan	28.750.000,00	0,00	-28.750.000,00
5.1.01.03.02.0004	Bunga Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tempat Umum	57.816.000,00	57.816.000,00	0,00
5.1.01.03.02.0005	Bunga Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	27.402.000,00	27.402.000,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	7.500.000,00	0,00	-7.500.000,00
5.1.01.03.02.0018	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	2.184.000,00	0,00	-2.184.000,00
5.1.01.03.02.0019	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila	250.000,00	250.000,00	0,00
5.1.01.03.02.0021	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan	720.000,00	0,00	-720.000,00
5.1.01.03.02.0022	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	750.000,00	0,00	-750.000,00
5.1.01.03.02.0024	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	4.750.000,00	0,00	-4.750.000,00
5.1.01.03.02.0031	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
5.1.01.03.02.0032	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00
5.1.01.03.02.0034	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Retribusi Pelayanan Kebersihan	0,00	28.750.000,00	28.750.000,00
5.1.01.03.02.0038	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	0,00	2.184.000,00	2.184.000,00
5.1.01.03.02.0040	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan	0,00	720.000,00	720.000,00
5.1.01.03.02.0041	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	0,00	750.000,00	750.000,00
5.1.01.03.02.0043	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	0,00	4.750.000,00	4.750.000,00
5.1.01.03.02.0044	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	47.566.506.000,00	47.566.506.000,00	0,00
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	47.566.506.000,00	47.566.506.000,00	0,00
5.1.01.03.04	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	22.552.768.000,00	22.552.768.000,00	0,00
5.1.01.03.04.0001	Belanja TKG PNSD	22.552.768.000,00	22.552.768.000,00	0,00
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1.681.623.000,00	1.681.623.000,00	0,00
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	1.681.623.000,00	1.681.623.000,00	0,00
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	15.921.100.000,00	15.921.100.000,00	0,00
5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	15.921.100.000,00	15.921.100.000,00	0,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	747.460.000,00	782.920.000,00	35.460.000,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.01.03.07.0002	Balokan Hiburanum Pengadaan Barang/Jasa	747.460.000,00	782.920.000,00	35.460.000,00
5.1.01.04	Balokan Biaya Lain Tunjangan DPRD	21.077.406.000,00	21.077.406.000,00	0,00
5.1.01.04.01	Balokan Uang Representasi DPRD	805.980.000,00	805.980.000,00	0,00
5.1.01.04.01.0001	Balokan Uang Representasi DPRD	805.980.000,00	805.980.000,00	0,00
5.1.01.04.02	Balokan Tunjangan Keluarga DPRD	137.309.200,00	137.309.200,00	0,00
5.1.01.04.02.0001	Balokan Tunjangan Keluarga DPRD	137.309.200,00	137.309.200,00	0,00
5.1.01.04.03	Balokan Tunjangan Beras DPRD	119.545.200,00	119.545.200,00	0,00
5.1.01.04.03.0001	Balokan Tunjangan Beras DPRD	119.545.200,00	119.545.200,00	0,00
5.1.01.04.04	Balokan Uang Paket DPRD	69.426.000,00	69.426.000,00	0,00
5.1.01.04.04.0001	Balokan Uang Paket DPRD	69.426.000,00	69.426.000,00	0,00
5.1.01.04.05	Balokan Tunjangan Jabatan DPRD	1.168.671.000,00	1.168.671.000,00	0,00
5.1.01.04.05.0001	Balokan Tunjangan Jabatan DPRD	1.168.671.000,00	1.168.671.000,00	0,00
5.1.01.04.06	Balokan Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00
5.1.01.04.06.0001	Balokan Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00
5.1.01.04.07	Balokan Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	25.500.000,00	25.500.000,00	0,00
5.1.01.04.07.0001	Balokan Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	25.500.000,00	25.500.000,00	0,00
5.1.01.04.08	Balokan Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	4.567.500.000,00	4.567.500.000,00	0,00
5.1.01.04.08.0001	Balokan Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	4.567.500.000,00	4.567.500.000,00	0,00
5.1.01.04.09	Balokan Tunjangan Reses DPRD	1.102.500.000,00	1.102.500.000,00	0,00
5.1.01.04.09.0001	Balokan Tunjangan Reses DPRD	1.102.500.000,00	1.102.500.000,00	0,00
5.1.01.04.10	Balokan Pembiayaan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	105.916.112,00	105.916.112,00	0,00
5.1.01.04.10.0001	Balokan Pembiayaan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	105.916.112,00	105.916.112,00	0,00
5.1.01.04.12	Balokan Tunjangan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD	7022.758.488,00	7022.758.488,00	0,00
5.1.01.04.12.0001	Balokan Biaya Jaminan Kesehatan bagi DPRD	73.318.488,00	73.318.488,00	0,00
5.1.01.04.12.0002	Balokan Biaya Kesehatan Kena DPRD	1.860.000,00	1.860.000,00	0,00
5.1.01.04.12.0003	Balokan Biaya Kesehatan DPRD	5.580.000,00	5.580.000,00	0,00
5.1.01.04.12.0004	Balokan Tunjangan Perumahan DPRD	6.942.000.000,00	6.942.000.000,00	0,00
5.1.01.04.13	Balokan Tunjangan Transportasi DPRD	5.568.000.000,00	5.568.000.000,00	0,00
5.1.01.04.13.0001	Balokan Tunjangan Transportasi DPRD	5.568.000.000,00	5.568.000.000,00	0,00
5.1.01.04.14	Balokan Uang Jasa Pengabdian DPRD	279.300.000,00	279.300.000,00	0,00
5.1.01.04.14.0001	Balokan Uang Jasa Pengabdian DPRD	279.300.000,00	279.300.000,00	0,00
5.1.01.08	Balokan Pembiayaan Lainnya Pimpinan DPRD	614.200.000,00	614.200.000,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.02.01.01.0044	Belanja Naik/Lis dari Pakan-Pakan	178.336.800,00	202.481.200,00	24.144.400,00
5.1.02.01.01.0045	Belanja Naik/Lis dan Pakan-Naik/Lis dan Pakan Lainnya	3.978.880.000,00	3.978.880.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0048	Belanja Persewaan Peralatan-Persediaan dan Peralatan Teknologi	7.149.500,00	2.755.500,00	-4.394.000,00
5.1.02.01.01.0049	Belanja Persewaan Penelitian-Persediaan Peralatan Lainnya	0,00	997.200,00	997.200,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	20.327.734.680,00	20.442.202.780,00	114.468.100,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.197.348.798,00	1.197.348.798,00	0,00
5.1.02.01.01.0054	Belanja Pakan Dinas KODH dan WKDH	48.910.400,00	48.910.400,00	0,00
5.1.02.01.01.0060	Belanja Pakan Dinas dan Atribut Pimpinan dan Peralatan KODH	121.224.000,00	121.224.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakan Sigi/Petani (PSH)	115.680.000,00	115.680.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakan Dinas Harian (PDH)	482.250.200,00	482.250.200,00	0,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakan Niras Lapangan (PDL)	718.690.300,00	718.690.300,00	0,00
5.1.02.01.01.0066	Belanja Pakan Dinas Upacara (PDU)	41.484.000,00	41.484.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakan Palsaman Kerja	58.602.400,00	58.602.400,00	0,00
5.1.02.01.01.0072	Belanja Pakan Kurva Bengkel	90.503.000,00	90.503.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakan Olahraga	231.856.000,00	231.856.000,00	0,00
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Fisik Pakai	2.425.200,00	2.425.200,00	0,00
5.1.02.01.02.0012	Belanja Baju-Tutup Plastik (UPVC)	2.425.200,00	2.425.200,00	0,00
5.1.02.01.03	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Aset Tetap	79.605.800,00	79.605.800,00	0,00
5.1.02.01.04.0410	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komunikasi Peralatan Jaringan	369.400,00	369.400,00	0,00
5.1.02.01.04.0411	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komunikasi Peralatan Komputer Lainnya	486.400,00	486.400,00	0,00
5.1.02.01.04.0721	Belanja Aset Tetap Lainnya-Bahan Peralatan/Bahan Perpustakaan/Alat-alat Kesehatan/Perustakan Tertetak Lainnya	78.750.000,00	78.750.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	92.593.135.581,00	97.400.471.131,00	4.807.335.550,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa-Biaya	62.776.471.604,00	55.951.822.418,00	-6.824.649.186,00
5.1.02.02.01.0003	Belanja Jasa (Infas) Sewa atau Pembelian, Sewa/Infas Pembawa Acara, dan Panitia	2.226.850.000,00	2.167.100.000,00	-59.750.000,00
5.1.02.02.01.0004	Belanja Jasa (Infas) Sewa atau Pembelian Kegiatan dan Panitia/Infas Pelaksanaan Kegiatan	1.375.750.000,00	1.375.750.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0005	Belanja Jasa (Infas) Sewa atau Pembelian Keterangan Ahli/Saksi Ahli/Asesmen/Asesori	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0006	Belanja Jasa (Infas) Sewa atau Pembelian atau Pendampingan	197.429.200,00	191.429.200,00	-6.000.000,00
5.1.02.02.01.0007	Belanja Jasa (Infas) Sewa atau Pembelian Restorasi	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0008	Belanja Jasa (Infas) Sewa atau Pembelian/Infas Pengiriman Jurnal, Bulletin, Majalah, Pengiriman Teknologi Informasi dan Komunikasi Lainnya	52.500.000,00	52.500.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0009	Belanja Jasa (Infas) Sewa atau Pembelian Penyelenggaraan Ujian	62.400.000,00	62.400.000,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.02.02.01.0010	Bantuan Operasional Buletin Sosial Tingkat Nasional, Kabupaten atau Kota	9.240.000,00	9.240.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0011	Bantuan Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	284.500.000,00	284.500.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0012	Bantuan Ijin Anggaran Pemerintah Daerah	246.000.000,00	246.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0013	Bantuan Jasa Tenaga Pendidikan	5.800.000.000,00	3.799.800.000,00	-2.000.200.000,00
5.1.02.02.01.0014	Bantuan Jasa Tenaga Kesehatan	3.894.896.000,00	9.025.496.000,00	5.130.600.000,00
5.1.02.02.01.0015	Bantuan Jasa Tenaga Laboratorium	34.775.000,00	34.775.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0016	Bantuan Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	58.961.800,00	58.961.800,00	0,00
5.1.02.02.01.0023	Bantuan Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Perikanan	1.529.432.000,00	1.405.832.000,00	-123.600.000,00
5.1.02.02.01.0026	Bantuan Jasa Tenaga Administrasi	8.745.200.000,00	7.158.800.000,00	-1.586.400.000,00
5.1.02.02.01.0027	Bantuan Jasa Tenaga Operasi Komputer	49.300.000,00	787.100.000,00	737.800.000,00
5.1.02.02.01.0028	Bantuan Jasa Tenaga Pelayanan Umum	260.414.000,00	1.144.144.800,00	883.730.800,00
5.1.02.02.01.0029	Bantuan Jasa Tenaga Ahli	1.820.567.800,00	1.192.058.890,00	-628.508.910,00
5.1.02.02.01.0030	Bantuan Jasa Tenaga Kebersihan	5.926.275.448,00	6.076.507.872,00	150.232.424,00
5.1.02.02.01.0031	Bantuan Jasa Tenaga Keamanan	728.000.000,00	1.067.600.000,00	341.600.000,00
5.1.02.02.01.0033	Bantuan Jasa Tenaga Supir	111.200.000,00	370.400.000,00	259.200.000,00
5.1.02.02.01.0037	Bantuan Jasa Lain Perlombaan/Pertandingan	109.202.500,00	109.202.500,00	0,00
5.1.02.02.01.0038	Bantuan Jasa Tata Rias	10.683.000,00	10.683.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0039	Bantuan Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	371.999.700,00	371.999.700,00	0,00
5.1.02.02.01.0041	Bantuan Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Atr. dan Lain-lain	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0042	Bantuan Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	64.800.000,00	64.800.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0046	Bantuan Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	710.000.000,00	710.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0047	Bantuan Jasa Penyelenggaraan Acara	18.784.800,00	18.784.800,00	0,00
5.1.02.02.01.0048	Bantuan Jasa Komitansi Asosiasi	41.754.400,00	41.754.400,00	0,00
5.1.02.02.01.0049	Bantuan Jasa Peralatan Pakatam, Alat Keselamatan dan Keadayabakti, serta Alat Rumah Tangga	40.608.600,00	40.608.600,00	0,00
5.1.02.02.01.0053	Bantuan Jasa Kalibrasi	9.565.700,00	9.565.700,00	0,00
5.1.02.02.01.0054	Bantuan Jasa Pengalihan Sampah	178.346.000,00	178.346.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0053	Bantuan Jasa Pengukuran Tanah	595.188.400,00	595.188.400,00	0,00
5.1.02.02.01.0055	Bantuan Jasa Masak/Remas, Film dan Lain-lain	337.931.950,00	337.931.950,00	0,00
5.1.02.02.01.0059	Bantuan Tagihan Tagihan	12.343.800,00	12.343.800,00	0,00
5.1.02.02.01.0060	Bantuan Tagihan Air	112.722.700,00	112.722.700,00	0,00
5.1.02.02.01.0061	Bantuan Tagihan Listrik	4.827.813.306,00	4.827.813.306,00	-64.707.500,00
5.1.02.02.01.0062	Bantuan Langganan Jurnai/Surat Kabar/Majalah	406.738.400,00	406.738.400,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.02.03.02.0232	Belanja Pembelian Ajar Kedokteran dan Kesehatan Alat Kesehatan-Alat Kedokteran Lainnya	121.618.400,00	121.618.400,00	0,00
5.1.02.03.02.0367	Belanja Pembelian Ajar Laboratorium-Alat Laboratorium-Bandaherasi Kalibrasi dan Insummikals-Alat Laboratorium-Standard dan Kelengkapan	21.268.600,00	21.268.600,00	0,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pembelian Komputer-Komputer Unit-Permal Computer	364.974.400,00	364.974.400,00	0,00
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pembelian Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	34.846.000,00	34.846.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pembelian Komputer-Peralatan Kanvasier-Peralatan Personal Computer	2.185.200,00	2.185.200,00	0,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	536.773.327,00	536.773.327,00	0,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempal Kerja-Bangunan Gedung Kamar	359.699.400,00	359.699.400,00	0,00
5.1.02.03.03.0018	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempal Kerja-Bangunan Gedung Tempal Pasakwan Bendera	20.851.128,00	20.851.128,00	0,00
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempal Kerja-Taman Gedung-Bangunan Gedung Tempal Kerja-Taman	20.452.800,00	20.452.800,00	0,00
5.1.02.03.03.0038	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempal Kerja-Bangunan Gedung Tempal Gedung Gedung Negara Gedung I	135.769.999,00	135.769.999,00	0,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan-Jaringan, dari Irigasi	327.114.800,00	327.114.800,00	0,00
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan, dari Irigasi-Letak Lainnya	327.114.800,00	327.114.800,00	0,00
5.1.02.03.05	Belanja Pembelian Aset Tetap Lainnya	159.286.700,00	161.502.200,00	2.215.500,00
5.1.02.03.05.0045	Belanja Pembelian Hewan-Hewan Ternak Ternak Lainnya	159.286.700,00	161.502.200,00	2.215.500,00
5.1.02.04	Belanja Pembelian Emas	38.898.814.525,00	39.090.477.437,00	191.662.912,00
5.1.02.04.01	Belanja Pembelian Emas Dalam Negeri	38.898.814.525,00	39.090.477.437,00	191.662.912,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Pembelian Emas Biasa	16.624.255.482,00	17.017.972.582,00	393.717.200,00
5.1.02.04.01.0002	Belanja Pembelian Emas Tetap	5.921.059.342,00	5.772.973.751,00	-48.079.591,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Pembelian Emas Dalam Kota	11.315.284.116,00	11.161.300.419,00	-153.974.697,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Pembelian Emas Paket Meeting Dalam Kota	4.408.648.585,00	4.408.648.585,00	0,00
5.1.02.04.01.0005	Belanja Pembelian Emas Paket Meeting Luar Kota	72.9573.000,00	729.573.000,00	0,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Lain/Masyarakat	3.944.500.000,00	4.071.220.000,00	128.720.000,00
5.1.02.05.10	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Lain/Masyarakat	3.402.500.000,00	3.402.500.000,00	0,00
5.1.02.05.10.0001	Belanja Bantuan yang Diberikan Perombaan	142.500.000,00	142.500.000,00	0,00
5.1.02.05.10.0005	Belanja Bantuan Keuangan Hibah dan Donasi (THP)	3.260.000.000,00	3.260.000.000,00	0,00

KODE	UPAJAH	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.02.05.02	Bantuan Jasa yang Diberikan kepada Pihak Rngg/Pmela/Lemlitaryarakat	542.000.000,00	668.720.000,00	126.720.000,00
5.1.02.05.02.0001	Bantuan Jasa yang Diberikan kepada Pihak Rngg/Pmela Lain	0,00	126.720.000,00	126.720.000,00
5.1.02.05.02.0002	Bantuan Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	542.000.000,00	542.000.000,00	0,00
5.1.02.88	Bantuan Barang dan Jasa BOS	70.955.880.000,00	70.955.880.000,00	0,00
5.1.02.88.88	Bantuan Barang dan Jasa BOS	70.955.880.000,00	70.955.880.000,00	0,00
5.1.02.88.88.8888	Bantuan Barang dan Jasa BOS	70.955.880.000,00	70.955.880.000,00	0,00
5.1.02.99	Bantuan Barang dan Jasa BLUD	25.200.000.000,00	25.200.000.000,00	0,00
5.1.02.99.99	Bantuan Barang dan Jasa BLUD	25.200.000.000,00	25.200.000.000,00	0,00
5.1.02.99.99.9999	Bantuan Barang dan Jasa BLUD	25.200.000.000,00	25.200.000.000,00	0,00
5.1.05	Bantuan Hibah	52.700.689.402,00	53.400.689.402,00	700.000.000,00
5.1.05.05	Bantuan Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum	45.796.535.402,00	46.496.535.402,00	700.000.000,00
5.1.05.05.01	Bantuan Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Terdaftar di Kementerian Sosial yang Didukung Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan	33.896.535.402,00	34.396.535.402,00	500.000.000,00
5.1.05.05.01.0001	Bantuan Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Terdaftar di Kementerian Sosial dan Sosial yang Didukung Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan	33.896.535.402,00	34.396.535.402,00	500.000.000,00
5.1.05.05.02	Bantuan Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	2.800.000.000,00	2.800.000.000,00	0,00
5.1.05.05.02.0001	Bantuan Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	2.800.000.000,00	2.800.000.000,00	0,00
5.1.05.05.03	Bantuan Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial	9.100.000.000,00	9.300.000.000,00	200.000.000,00
5.1.05.05.03.0001	Bantuan Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial	9.100.000.000,00	9.300.000.000,00	200.000.000,00
5.1.05.07	Bantuan Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.824.184.000,00	1.824.184.000,00	0,00
5.1.05.07.01	Bantuan Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.824.184.000,00	1.824.184.000,00	0,00
5.1.05.07.01.0001	Bantuan Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.824.184.000,00	1.824.184.000,00	0,00
5.1.05.08	Bantuan Hibah Dana BOS	5.079.970.000,00	5.079.970.000,00	0,00
5.1.05.08.02	Bantuan Hibah Dana BOS (BOP PALU)	4.806.770.000,00	4.806.770.000,00	0,00
5.1.05.08.02.0001	Bantuan Hibah Dana BOS (BOP PALU)	4.806.770.000,00	4.806.770.000,00	0,00
5.1.05.08.03	Bantuan Hibah Dana BOS (BOP Kesetaraan)	473.200.000,00	473.200.000,00	0,00
5.1.05.08.03.0001	Bantuan Hibah Dana BOS (BOP Kesetaraan)	473.200.000,00	473.200.000,00	0,00
5.1.06	Bantuan Hibah Lainnya	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.06.01	Bantuan Sosial kepada Individu	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
5.1.06.01.01	Bantuan Sosial Sosial Uang yang direncanakan sebagai bantuan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
5.1.06.01.01.0001	Bantuan Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan sebagai bantuan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
5.2	BELANJA MODAL	183.455.111.386,00	187.160.060.251,00	3.704.948.865,00
5.2.01	Bantuan Modal Tanah	60.460.000,00	60.460.000,00	0,00
5.2.01.01	Bantuan Modal Tanah	60.460.000,00	60.460.000,00	0,00
5.2.01.01.01	Bantuan Modal Tanah Perak	60.460.000,00	60.460.000,00	0,00
5.2.01.01.01.0004	Bantuan Modal Tanah Perak Lainnya	0,00	0,00	0,00
5.2.01.01.01.0007	Bantuan Modal Tanah Perak Lainnya	60.460.000,00	60.460.000,00	0,00
5.2.02	Bantuan Modal Perabotan dan Mesin	19.658.808.883,00	19.629.533.715,00	-30.275.168,00
5.2.02.01	Bantuan Modal Alat Besar	6.520.400,00	6.520.400,00	0,00
5.2.02.01.03	Bantuan Modal Alat Berat	6.520.400,00	6.520.400,00	0,00
5.2.02.01.03.0006	Bantuan Modal Rampa	3.318.600,00	3.318.600,00	0,00
5.2.02.01.03.0006	Bantuan Modal Mesin Bor	1.836.400,00	1.836.400,00	0,00
5.2.02.01.03.0016	Bantuan Modal Alat Berat Lainnya	1.565.400,00	1.565.400,00	0,00
5.2.02.02	Bantuan Modal Alat Angkutan	4.211.167.900,00	4.211.167.900,00	0,00
5.2.02.02.01	Bantuan Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	4.211.167.900,00	4.211.167.900,00	0,00
5.2.02.02.01.0001	Bantuan Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perantara	591.870.000,00	591.870.000,00	0,00
5.2.02.02.01.0002	Bantuan Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	649.857.000,00	649.857.000,00	0,00
5.2.02.02.01.0004	Bantuan Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	444.347.900,00	444.347.900,00	0,00
5.2.02.02.01.0009	Bantuan Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	2.525.093.000,00	2.525.093.000,00	0,00
5.2.02.03	Bantuan Modal Alat Berat dan Alat Ukur	254.847.120,00	254.847.120,00	0,00
5.2.02.03.03	Bantuan Modal Alat Ukur	254.847.120,00	254.847.120,00	0,00
5.2.02.03.03.0009	Bantuan Modal Alat Ukur Lain-Lain	254.847.120,00	254.847.120,00	0,00
5.2.02.03.03.0021	Bantuan Modal Alat Ukur Lainnya	0,00	0,00	0,00
5.2.02.04	Bantuan Modal Alat Pertanian	3.695.400,00	10.045.700,00	6.350.300,00
5.2.02.04.01	Bantuan Modal Alat Pengolahan	3.695.400,00	10.045.700,00	6.350.300,00
5.2.02.04.01.0003	Bantuan Modal Alat Panen	0,00	0,00	0,00
5.2.02.04.01.0008	Bantuan Modal Alat Produksi Perikanan	0,00	6.350.300,00	6.350.300,00
5.2.02.04.01.0010	Bantuan Modal Alat Pengolahan Lainnya	3.695.400,00	3.695.400,00	0,00
5.2.02.05	Bantuan Modal Alat Listrik dan Rumah Tangga	978.412.470,00	876.528.344,00	-101.891.126,00
5.2.02.05.02	Bantuan Modal Alat Rumah Tangga	978.412.470,00	876.528.344,00	-101.891.126,00
5.2.02.05.02.0001	Bantuan Modal Alat Listrik	510.530.400,00	538.974.442,00	28.444.042,00
5.2.02.05.02.0004	Bantuan Modal Alat Pendingin	376.321.070,00	281.403.422,00	-94.917.654,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.2.02.06 02.0006	Belanja Modal Alat Timah Tangga Lainnya (Mona Lha)	89.754.184,00	54.336.680,00	-35.417.504,00
5.2.02.06 03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapal Pejabat	1.813.800,00	1.813.800,00	0,00
5.2.02.05 03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	1.813.800,00	1.813.800,00	0,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Bantu, Komunikasi dan Pemaman	2.487.524.000,00	2.494.762.359,00	7.238.359,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	2.370.338.000,00	2.366.570.359,00	-3.767.641,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Perabotan Studio Video dan Film	2.317.235.500,00	2.317.235.500,00	0,00
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	62.102.500,00	69.340.659,00	7.238.359,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	108.186.000,00	108.186.000,00	0,00
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	31.577.200,00	31.577.200,00	0,00
5.2.02.06.02.0011	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	76.608.800,00	76.608.800,00	0,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	1.910.487.670,00	1.910.487.670,00	0,00
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	99.582.400,00	99.582.400,00	0,00
5.2.02.07.01.0007	Belanja Modal Alat Kedokteran Mata	45.255.700,00	45.255.700,00	0,00
5.2.02.07.01.0028	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	54.326.700,00	54.326.700,00	0,00
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	1.810.905.270,00	1.810.905.270,00	0,00
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	1.810.905.270,00	1.810.905.270,00	0,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	341.550.000,00	341.550.000,00	0,00
5.2.02.08.01	Belanja Modal Alat Laboratorium	341.550.000,00	341.550.000,00	0,00
5.2.02.08.01.0058	Belanja Modal Alat Laboratorium Pendidikan	341.550.000,00	341.550.000,00	0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	2.160.853.434,00	2.279.879.733,00	119.026.299,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	1.823.656.534,00	1.957.239.040,00	133.582.506,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	558.367.934,00	691.550.440,00	133.582.506,00
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	1.265.288.600,00	1.265.288.600,00	0,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Perakitan Komputer	397.196.900,00	322.640.693,00	-74.556.207,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Perakitan Personal Computer	241.599.475,00	224.020.960,00	-17.578.515,00
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Perakitan Jaringan	0,00	0,00	0,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Perakitan Komputer Lainnya	95.597.425,00	98.619.733,00	3.022.308,00
5.2.02.11	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Penyusutan	1.260.000.000,00	1.260.000.000,00	0,00
5.2.02.13.03	Belanja Modal Pengolahan dan Penyusutan	1.260.000.000,00	1.260.000.000,00	0,00
5.2.02.13.03.0002	Belanja Modal Alat Pengolahan Air	1.260.000.000,00	1.260.000.000,00	0,00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Peralatan Kerja	48.830.100,00	48.830.100,00	0,00
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	48.830.100,00	48.830.100,00	0,00
5.2.02.15.02.0006	Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya	48.830.100,00	48.830.100,00	0,00
5.2.02.17	Belanja Modal Alat Meja	29.914.389,00	29.914.389,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.2.02.18.01	Belanja Modal Alat Pelaya, Pelatihan dan Personalia	29.914.389,00	29.914.389,00	0,00
5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Alat Pelaya, Pelatihan dan Personalia Lainnya	29.914.389,00	29.914.389,00	0,00
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	4.165.000.000,00	4.165.000.000,00	0,00
5.2.02.88.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	4.165.000.000,00	4.165.000.000,00	0,00
5.2.02.88.88.8888	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	4.165.000.000,00	4.165.000.000,00	0,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.800.000.000,00	1.800.000.000,00	0,00
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.800.000.000,00	1.800.000.000,00	0,00
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.800.000.000,00	1.800.000.000,00	0,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	81.232.238.127,00	81.475.066.243,00	242.828.116,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	81.232.238.127,00	81.475.066.243,00	242.828.116,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	80.681.470.897,00	80.924.299.013,00	242.828.116,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	5.343.600.909,00	5.185.512.013,00	-158.088.896,00
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	7.637.529.308,00	7.653.778.320,00	26.249.012,00
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	67.358.687.700,00	67.743.355.700,00	374.668.000,00
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	33.652.880,00	33.652.980,00	0,00
5.2.03.01.01.0033	Belanja Modal Bangunan Parkir	298.000.000,00	298.000.000,00	0,00
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	550.767.230,00	550.767.230,00	0,00
5.2.03.01.02.0002	Belanja Modal Rumah Negara Golongan II	492.500.000,00	492.500.000,00	0,00
5.2.03.01.02.0003	Belanja Modal Rumah Negara Golongan III	58.267.230,00	58.267.230,00	0,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jembatan, dan Irigasi	82.933.9115,00	85.860.000.293,00	3.466.809.136,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	72.973.061.939,00	76.439.871.075,00	3.466.809.136,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	70.783.061.939,00	74.053.871.075,00	3.270.809.136,00
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kapupaten	57.328.561.939,00	58.149.371.075,00	820.809.136,00
5.2.04.01.01.0005	Belanja Modal Jalan Desa	13.454.500.000,00	15.904.500.000,00	2.450.000.000,00
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	2.190.000.000,00	2.386.000.000,00	196.000.000,00
5.2.04.01.02.0005	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Desa	2.190.000.000,00	2.386.000.000,00	196.000.000,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	6.357.496.050,00	6.357.496.050,00	0,00
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	6.499.338.550,00	6.499.338.550,00	0,00
5.2.04.02.01.0001	Belanja Modal Bangunan Waduk Irigasi	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Perobawa Irigasi	6.309.338.550,00	6.309.338.550,00	0,00
5.2.04.02.01.0008	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	172.000.000,00	172.000.000,00	0,00
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengendalian Banjir dan Pemanggulangan Bencana Alam	380.000.000,00	380.000.000,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	BESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.2.04.02.04.0001	Belanja Modal Bangunan Perumahan Sungai Perumahan Penanggulangan Bencana Negeri	380.000.000,00	380.000.000,00	0,00
5.2.04.02.05	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	1.478.157.500,00	1.478.157.500,00	0,00
5.2.04.02.06.0006	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	1.478.157.500,00	1.478.157.500,00	0,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jalan	1.062.633.168,00	1.062.633.168,00	0,00
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jalan Aspal	1.062.633.168,00	1.062.633.168,00	0,00
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jalan Aspal Lainnya	1.062.633.168,00	1.062.633.168,00	0,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	35.412.219,00	0,00	-35.412.219,00
5.2.05.01	Belanja Modal Aset Tetap Perbukitan	35.412.219,00	0,00	-35.412.219,00
5.2.05.01.04	Belanja Modal Aset	35.412.219,00	0,00	-35.412.219,00
5.2.05.01.04.0002	Belanja Modal Aset Lainnya	35.412.219,00	0,00	-35.412.219,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya Aset Tidak Berwujud	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00
5.2.06.01.01.0006	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Kajian	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
5.2.06.01.01.0008	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	7.638.787.234,00	5.564.765.780,00	-2.074.021.454,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	7.638.787.234,00	5.564.765.780,00	-2.074.021.454,00
5.3.01.41	Belanja Tidak Terduga	7.638.787.234,00	5.564.765.780,00	-2.074.021.454,00
5.3.01.41.01	Belanja Tidak Terduga	7.638.787.234,00	5.564.765.780,00	-2.074.021.454,00
5.3.01.41.01.0001	Belanja Tidak Terduga	7.638.787.234,00	5.564.765.780,00	-2.074.021.454,00
5.4	BELANJA TRANSFER	234.539.862.600,00	234.539.862.600,00	0,00
5.4.01	Belanja Transfer Hasil	5.417.000.000,00	5.417.000.000,00	0,00
5.4.01.01	Belanja Transfer Hasil Pihak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa	5.417.000.000,00	5.417.000.000,00	0,00
5.4.01.01.03	Belanja Transfer Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa	5.417.000.000,00	5.417.000.000,00	0,00
5.4.01.01.03.0001	Belanja Transfer Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa	5.417.000.000,00	5.417.000.000,00	0,00
5.4.01.02	Belanja Transfer Hasil Retribusi Daerah Kelembagaan Kepada Pemerintah Desa	346.044.000,00	346.044.000,00	0,00
5.4.01.02.01	Belanja Transfer Hasil Retribusi Daerah Kelembagaan Kepada Pemerintah Desa	346.044.000,00	346.044.000,00	0,00
5.4.01.02.01.0001	Belanja Transfer Hasil Retribusi Daerah Kelembagaan Kepada Pemerintah Desa	346.044.000,00	346.044.000,00	0,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	228.776.818.600,00	228.776.818.600,00	0,00
5.4.02.01	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.4.02.01.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Provinsi	0,00	0,00	0,00
5.4.02.01.01.0001	Belanja Bantuan Keuangan Umum kepada Pemerintah Provinsi	0,00	0,00	0,00
5.4.02.03	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
5.4.02.03.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
5.4.02.03.02.0001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	228.776.818.600,00	228.776.818.600,00	0,00
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	228.776.818.600,00	228.776.818.600,00	0,00
5.4.02.05.02.0004	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	151.802.945.000,00	151.802.945.000,00	0,00
5.4.02.05.02.0005	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	76.973.873.600,00	76.973.873.600,00	0,00
	Jumlah Belanja	1.437.116.577.846,00	1.453.147.105.496,00	16.030.527.650,00
	Total Surplus/(Defisit)	-33.232.722.717,00	-37.400.000.000,00	-4.167.277.283,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00	0,00
6.1.01	Sisa Lebih Penyalangan Anggaran Tahun Sebelumnya	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00	0,00
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dari Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00	0,00
6.1.01.07.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00	0,00
6.1.01.07.01.0001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00	0,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	6.767.277.283,00	2.600.000.000,00	-4.167.277.283,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	6.767.277.283,00	2.600.000.000,00	-4.167.277.283,00
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	6.767.277.283,00	2.600.000.000,00	-4.167.277.283,00
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	6.767.277.283,00	2.600.000.000,00	-4.167.277.283,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	6.767.277.283,00	2.600.000.000,00	-4.167.277.283,00
	Pembiayaan Netto	33.232.722.717,00	37.400.000.000,00	4.167.277.283,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00



Kab. Landak, 29 April 2024

Pj. BUPATI LANDAK
TTD
SAMUEL